



KOHERENSI ASUMSI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL RAPBN 2026 DALAM STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Yiyis Aldi Mebra* & Venti Eka Satya**

Abstrak

Pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan strategis mengenai asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 untuk menjawab tantangan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Artikel ini menganalisis strategi mewujudkan asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026. Strategi utama mencakup pendekatan defensif-adaptif yang mengintegrasikan penguatan ketahanan nasional dengan transformasi struktural ekonomi melalui delapan agenda prioritas pembangunan. Pemerintah mengadopsi strategi konsolidasi fiskal dengan parameter konservatif-realistis, menetapkan target pertumbuhan 5,2–5,8 persen dan defisit 2,48–2,53 persen dari PDB. Strategi optimalisasi penerimaan dilakukan melalui reformasi perpajakan komprehensif dan ekstensifikasi perpajakan. Pencapaian target pertumbuhan memerlukan strategi komprehensif yang mengombinasikan peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan optimalisasi kebijakan fiskal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Komisi XI DPR perlu memaksimalkan fungsi pengawasan dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan fiskal. Selain itu juga memastikan bahwa transformasi struktural ekonomi pemerintah tidak menimbulkan kerentanan struktur ekonomi dengan menciptakan trade-off optimal antara growth ambition dan fiscal prudence.

Pendahuluan

Dinamika ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, dan volatilitas pasar keuangan menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang adaptif dan resiliensi. Pergolakan global yang terus berlangsung memerlukan pendekatan kebijakan yang mampu mengintegrasikan stabilitas makroekonomi dengan agenda transformasi struktural (Kementerian Keuangan, 2025).

Dalam konteks ini, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan kompleks yang dihadapi perekonomian nasional (Kementerian Keuangan, 2025). Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana mewujudkan asumsi ekonomi makro yang realistis, namun ambisius.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: yiyis.merba@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: venti.satya@dpr.go.id

Hal ini mencakup pencapaian target pertumbuhan 5,2–5,8 persen, mempertahankan inflasi dalam koridor 1,5–3,5 persen, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya target menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44–4,96 persen dan menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen, sembari mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit anggaran 2,48–2,53 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) (Estherina, 2025). Artikel ini menganalisis strategi mewujudkan asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026 yang telah disepakati pemerintah dan DPR RI, dengan fokus pada mekanisme koordinasi kebijakan dan implementasi program prioritas nasional dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Asumsi Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2026

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,2–5,8 persen, sejalan dengan proyeksi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Target ini menunjukkan optimisme terhadap kemampuan ekonomi Indonesia mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global (Kementerian Keuangan, 2025). Pencapaian target tersebut memerlukan sinergi kebijakan fiskal ekspansif terukur dengan reformasi struktural yang meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Strategi fiskal harus mampu menstimulasi ekonomi sambil menjaga keberlanjutan jangka panjang. (Estherina, 2025).

Indikator makroekonomi utama mencakup target inflasi 1,5–3,5 persen untuk menjaga stabilitas harga yang kondusif bagi pertumbuhan. Nilai tukar rupiah diproyeksikan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS guna mendukung daya saing ekspor dan mengendalikan inflasi impor. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditetapkan 6,6–7,2 persen, mempertimbangkan keseimbangan antara pembiayaan pemerintah yang efisien dengan stabilitas sistem keuangan (Kementerian Keuangan, 2025). Defisit anggaran ditetapkan 2,48–2,53 persen dari PDB, hal ini mencerminkan komitmen terhadap disiplin fiskal berkelanjutan (Estherina, 2025). Level ini masih dalam batas aman dan tidak mengancam keberlanjutan fiskal jangka panjang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa dengan persetujuan ini, pemerintah akan menyusun RAPBN dan nota keuangan yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2025 (Kemenkeu, 2025).

Kesepakatan Pemerintah dan DPR RI juga mencakup target ambisius untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44–4,96 persen (Kementerian Keuangan, 2025). Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas. Tingkat kemiskinan ditargetkan 6,5–7,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0–0,5 persen (Kementerian Keuangan, 2025). Target kemiskinan ekstrem mendekati nol persen mencerminkan komitmen pengentasan kemiskinan absolut dan memastikan tidak ada warga negara yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Strategi Mewujudkan Asumsi Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

Pemerintah telah merumuskan kerangka strategis untuk implementasi asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026 melalui pendekatan yang mengutamakan penguatan ketahanan nasional dan transformasi struktural ekonomi. Paradigma kebijakan ini didasarkan pada antisipasi terhadap kompleksitas tantangan global yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, eskalasi proteksionisme perdagangan, dan volatilitas ekonomi internasional yang berimplikasi signifikan terhadap stabilitas makroekonomi domestik.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 mengadopsi parameter makroekonomi yang mencerminkan pendekatan konservatif-realistis. Hal ini terlihat dari penetapan target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penetapan parameter tersebut mengindikasikan orientasi kebijakan yang memprioritaskan sustainabilitas fiskal dan mitigasi risiko eksternal, dibandingkan dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang agresif, namun berpotensi menimbulkan kerentanan struktur ekonomi.

Analisis terhadap parameter ekonomi makro yang disepakati menunjukkan bahwa pencapaian target pertumbuhan memerlukan strategi komprehensif yang mengombinasikan peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan optimalisasi kebijakan fiskal. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak ekonomi eksternal.

Penetapan target defisit anggaran mengindikasikan komitmen terhadap disiplin fiskal yang sejalan dengan *international best practices* dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah mengadopsi strategi konsolidasi fiskal yang bertujuan untuk mempertahankan *debt sustainability ratio* dan menjaga kredibilitas fiskal jangka panjang.

Penerimaan pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pilar utama pendukung belanja pembangunan. Untuk optimalisasi penerimaan, pemerintah memerlukan reformasi perpajakan komprehensif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan modernisasi administrasi pajak. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dalam penilain kebijakan fiskal 2026, menekankan pentingnya implementasi strategi ekstensifikasi basis perpajakan melalui optimalisasi penerimaan dari sektor cukai, tarif komoditas mineral dan batubara, serta digitalisasi ekonomi untuk mencapai target penerimaan negara yang realistis-optimistis. Rekomendasi tersebut sejalan dengan teori *optimal taxation* yang mengadvokasi diversifikasi sumber penerimaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap *volatile revenue streams*, khususnya dari sektor komoditas yang rentan terhadap *external shocks* (Akbar, 2025).

Strategi implementasi yang dirumuskan pemerintah berfokus pada delapan agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu: (1) pencapaian swasembada pangan; (2) realisasi kemandirian energi; (3) implementasi program Makan Bergizi Gratis; (4) peningkatan kualitas sistem pendidikan; (5) penguatan layanan kesehatan berkualitas; (6) pemberdayaan ekonomi pedesaan dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan integrasi perdagangan global (Kementerian Keuangan, 2025). Pendekatan multisektoral ini mengakomodasi prinsip utilitarian "*the greatest good for the greatest many*" dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya publik untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi terhadap kerangka kerja kebijakan yang dirumuskan menunjukkan bahwa strategi defensif-adaptif yang diadopsi pemerintah memberikan *trade-off* optimal antara *growth ambition* dan *fiscal prudence*. Pendekatan ini memungkinkan *maintenance of macroeconomic stability* sambil memfasilitasi transformasi struktural yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Penutup

Kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2026 menjadi pondasi penting dalam merancang kebijakan fiskal yang responsif dan menyeluruh untuk menghadapi dinamika global. Penetapan parameter utama seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kurs rupiah, dan besaran defisit anggaran menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan kontinuitas fiskal negara. Pemerintah telah menetapkan strategi untuk mencapai target ekonomi makro melalui pendekatan yang mengutamakan penguatan ketahanan nasional dan transformasi struktural ekonomi. Penetapan parameter ekonomi makro mengindikasikan bahwa pemerintah memprioritaskan sustainabilitas fiskal dan mitigasi risiko eksternal, dibandingkan dengan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang agresif, namun berpotensi menimbulkan kerentanan struktur ekonomi. Pada sisi lain strategi implementasi yang dirumuskan untuk mencapai target tersebut berfokus pada delapan agenda prioritas pembangunan nasional

Komisi XI DPR RI perlu memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal. Komisi XI DPR RI juga perlu memastikan bahwa transformasi struktural ekonomi pemerintah tidak menimbulkan kerentanan struktur ekonomi dengan menciptakan *trade-off* yang optimal antara *growth ambition* dan *fiscal prudence*.

Referensi

- Akbar, R. J. & Ilham, R. F. (2025, Juni 24). Proyeksikan ekonomi RI tumbuh 5,3% pada 2026, Banggar: Musuh kita ketidakpastian. *Viva.co.id*. <https://www.viva.co.id/bisnis/1833770-proyeksikan-ekonomi-ri-tumbuh-5-3-pada-2026-banggar-musuh-kita-ketidakpastian>
- Estherina. I. (2025, Juli 7). Pemerintah dan DPR sepakat kejar target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,2-5,8 persen. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-dan-dpr-sepakat-kejar-target-pertumbuhan-ekonomi-2026-sebesar-5-2-5-8-persen-1925288>
- Kementerian Keuangan (2025, Juli 1). Menkeu Sri Mulyani: KEM PPKF RAPBN 2026 fokus perkuat ketahanan nasional dan akselerasi transformasi ekonomi. *Kementerian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/KEM-PPKF-RAPBN-2026>
- Kementerian Keuangan (2025, Juli 7). Pemerintah dan DPR sepakati asumsi makro dan target pembangunan RAPBN 2026. *Fiskal Kemenkeu*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2025/07/07/4541-pemerintah-dan-dpr-sepakati-asumsi-makro-dan-target-pembangunan-rapbn-2026>
- Kennard. (2025, Juli 8). Asumsi ekonomi makro RAPBN 2026 dalam KEM-PPKF 2026. *Pajakku*. <https://artikel.pajakku.com/asumsi-ekonomi-makro-rapbn-2026-dalam-kem-ppkf-2026>
- Pemerintah dan DPR sepakati asumsi dasar makro 2026, cermati rinciannya. (2025, Juli 7). *Nasional Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-dan-dpr-sepakati-asumsi-dasar-makro-2026-cermati-rinciannya>
- Saharani, K. D., Ardiani, D., & Nurcahya, W. F. (2024, Juni). Strategi Pembiayaan APBN Dalam Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global. *Journal of Law, Administration, and Social Science*. 4(5). 821–834. <https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/893/734>

